

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak agen (pihak manajemen) dengan principal (pemegang saham). Kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham seringkali bertentangan dan dapat menyebabkan konflik diantara kedua pihak tersebut (Devina, 2020). Pemilik perusahaan sebagai prinsipal merupakan pihak yang mempercayakan perusahaannya kepada agen, dimana hal ini adalah pihak manajemen perusahaan, untuk menjalankan suatu kegiatan atas nama prinsipal. Pihak manajemen perusahaan sebagai agen memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam perusahaan sedangkan pemilik perusahaan sebagai prinsipal melakukan evaluasi dari informasi yang diberikan oleh agen.

Teori agensi dalam prakteknya menghasilkan konflik antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan pihak manajemen perusahaan sebagai agen (*agency problem*) (Devina, 2020). Konflik tersebut diakibatkan oleh asimetri informasi dan perbedaan kepentingan serta tujuan antara prinsipal dan agen. Asimetri informasi diakibatkan oleh berkurangnya nilai informasi yang disampaikan kepada prinsipal oleh agen. Pihak manajemen perusahaan memiliki lebih banyak pengetahuan internal perusahaan secara detail karena pihak manajemen perusahaan hadir secara langsung dalam aktivitas sehari-hari perusahaan. Sedangkan pemilik perusahaan tidak hadir dalam aktivitas operasi perusahaan secara keseluruhan sehingga tidak memiliki pengetahuan yang luas mengenai internal perusahaan.

Penyampaian informasi dapat menunjukkan adanya perbedaan kepentingan dan tujuan antara prinsipal dan agen. Pihak manajemen perusahaan menginginkan kinerja perusahaan baik yang ditunjukkan dengan pertumbuhan laba agar

menghasilkan evaluasi yang baik sehingga terjadi pemberian bonus yang tinggi diberikan oleh pemilik perusahaan. Hal ini dilakukan dengan menyampaikan hanya informasi yang dibutuhkan untuk mendapat impresi sesuai dengan kepentingan dan tujuan pihak manajemen tersebut. Namun, pemilik perusahaan membutuhkan informasi yang sesungguhnya terjadi dalam perusahaan.

Perusahaan menggunakan jasa auditor sebagai pihak ketiga untuk meminimalisir terjadinya konflik antara prinsipal dan agen yang disebabkan oleh asimetri informasi dan perbedaan kepentingan serta tujuan. Auditor memberikan jasanya dengan menghasilkan laporan audit terhadap laporan keuangan perusahaan sehingga prinsipal dapat menggunakan laporan keuangan auditan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya hasil laporan keuangan auditan dari auditor, maka laporan keuangan tersebut diyakinkan telah memenuhi kriteria relevansi dan reliabilitas. Relevansi informasi memiliki berhubungan erat dengan *audit delay* karena manfaat laporan keuangan berkurang apabila penyajian laporan keuangan auditan memerlukan waktu yang panjang.

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang memiliki arti suka menurut, taat, dan berdisiplin. Sedangkan, kepatuhan berarti sifat patuh atau ketaatan (www.kbbi.web.id). Teori kepatuhan memiliki arti yang berdasarkan pada ekspektasi atas timbal balik dan usaha untuk menghindari sanksi yang mungkin dikenakan (Arie Susandya & Suryandari, 2021). Sanksi yang diberikan dianggap sebagai satu-satunya cara agar kepatuhan hukum dapat tercapai, apabila terjadi penolakan ataupun ketidakmampuan sehingga dapat disimpulkan bahwa teori kepatuhan lebih berfokus pada solusi hukum (Pasupati & Husain, 2022).

Kecenderungan mematuhi hukum disebabkan oleh sesuai dan konsistennya hukum tersebut dengan norma-norma yang dimiliki oleh seorang individu. Terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi terkait dengan kepatuhan individu. Perspektif dasar tersebut antara lain perspektif instrumental dan normative (Pasupati & Husain, 2022). Perspektif instrumental mengasumsikan bahwa individu didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan

berwujud, insentif, dan hukuman yang berkaitan dengan perilaku. Perspektif normatif memiliki kaitan dengan apa yang individu tersebut anggap moral dan bertentangan dengan kepentingan mereka.

Perusahaan dalam penyampaian laporan keuangan kepada publik, secara instrumental, mendapat respon positif dengan segera menyampaikan laporan keuangannya. Sedangkan perusahaan memiliki tendensi untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena dianggap sesuai moralitas perusahaan.

Di Indonesia, kepatuhan terhadap penyampaian laporan keuangan tahun telah diatur dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-346/BL/2011 lampiran peraturan nomor X.K.2 dan Peraturan Bursa Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan nomor III.1.6.2. Perusahaan yang melanggar peraturan tersebut, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Bursa Nomor I-H ketentuan II.6. Hal ini merupakan pengimplementasian terkait komitmen normatif melalui legitimasi. Komitmen normatif melalui legitimasi merupakan mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikter perilaku individu (Jura & Tewu, 2021).

Teori kepatuhan dapat mendorong perusahaan *listing* di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu sehingga hal ini membuat perusahaan untuk memerhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu yang dibutuhkan dalam menyampaikan hasil laporan keuangan auditan.

2.1.3 Perusahaan *Go Public*

Berdasarkan Bursa Efek Indonesia, *go public* merupakan proses perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau publik dengan cara mendaftarkan perusahaannya melalui serangkaian proses IPO atau *initial public offering* kepada BEI sehingga perusahaan dapat menjual sahamnya kepada masyarakat umum di Bursa Efek Indonesia (Bursa Efek Indonesia, 2023). Adapun manfaat yang dapat diterima oleh perusahaan yang melakukan *initial public offering* (Bursa Efek Indonesia, 2023):

1. Memperoleh sumber pendanaan baru
2. Memberikan keunggulan kompetitif yang digunakan untuk pengembangan usaha
3. Melakukan akuisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham
4. Peningkatan kemampuan *going concern*
5. Meningkatkan citra perusahaan
6. Meningkatkan nilai perusahaan

2.1.4 Laporan Keuangan

Perusahaan yang telah *go public* dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban dalam menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan didefinisikan oleh Kieso, *et al.* (2018) sebagai “*the principal means through which a company communicates its financial information to those outside it*”. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2018) dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik (IAI, 2020). Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, laporan keuangan harus menyajikan informasi entitas mengenai:

- (a) Aset;
- (b) Liabilitas;
- (c) Ekuitas;
- (d) Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;
- (e) Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;

(f) Arus kas

Laporan keuangan harus memiliki komponen yang lengkap. Komponen laporan keuangan yang lengkap meliputi (IAI, 2020):

(a) Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode; IAI (2020) menjelaskan bahwa neraca berisi aset tetap, properti investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan, investasi yang menggunakan metode ekuitas, persediaan, piutang dagang dan piutang lainnya, kas dan setara kas, total aset yang dimiliki untuk dijual, utang dagang dan terutang lainnya, provisi, liabilitas keuangan, liabilitas dan aset untuk pajak kini, liabilitas dan aset pajak tangguhan, liabilitas yang dimiliki untuk dijual, kepentingan non-pengendali, modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

(b) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selain periode;

IAI (2020) menjelaskan bahwa komponen laporan ini terdiri dari: pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan *joint ventures* yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba rugi, komponen dari pendapatan komprehensif lain, total laba rugi komprehensif.

(c) Laporan perubahan ekuitas selama periode;

Laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut

a. Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali.

b. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.

- (d) Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian. Laporan arus kas selama periode;

Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.

- (e) Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;

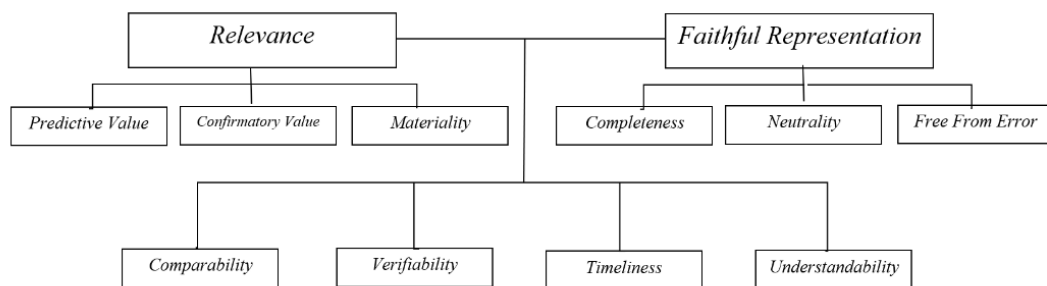
Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf 117-124, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan keuangan, dan menyediakan informasi yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

- (f) Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

Informasi yang didapat dari keenam sajian laporan keuangan yang telah disebut kemudian diinterpretasikan sehingga pengguna laporan keuangan dapat memanfaatkannya. Menurut Weygandt *et al.* (2015), pengguna laporan keuangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- (a) Pengguna internal yaitu pihak dalam entitas yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis.
- (b) Pengguna eksternal yaitu pihak diluar entitas yang menginginkan informasi keuangan perusahaan. Pengguna eksternal memiliki dua tipe umum yaitu investor dan kreditor. Investor memanfaatkan informasi keuangan untuk membeli, memiliki, atau menjual kepemilikan saham perusahaan. Kreditor memanfaatkan informasi keuangan untuk meninjau risiko dari pemberian kredit atau pemberian pinjaman modal.

Informasi dalam laporan keuangan akan bermanfaat bagi para penggunanya apabila memenuhi karakteristik kualitatif.



Gambar 2. 1 Karakteristik Laporan Keuangan

Sumber: Kieso *et al.* (2018)

Dalam tabel yang digambarkan, Kieso menyatakan bahwa terdapat dua kualitas fundamental yaitu relevansi (*relevance*) dan *faithful representation*. Suatu informasi dapat dikatakan relevan apabila memiliki:

(a) *Predictive Value*

Nilai prediktif merupakan ketika informasi tersebut dapat digunakan sebagai *input* yang dimanfaatkan oleh pengguna untuk memprediksi hasil (*output*) di masa mendatang.

(b) *Confirmatory Value*

Nilai konfirmatori merupakan ketika informasi tersebut menyediakan hasil kaji (mengkonfirmasi atau mengubah) tentang evaluasi sebelumnya.

(c) *Materiality*

Informasi dapat dianggap material jika penghilangan atau salah saji informasi tersebut dapat memberikan perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna laporan keuangan. Materialitas merupakan aspek relevansi yang lebih spesifik untuk suatu entitas tertentu yang didasarkan pada sifat atau besarnya, atau keduanya, dari pos-pos dimana informasi yang dimaksud berhubungan dalam konteks laporan keuangan masing-masing entitas.

Suatu informasi dapat dikatakan *faithful representation* apabila angka-angka yang tercatat benar-benar terjadi dan mengandung:

(a) *Completeness*

Informasi yang dibutuhkan disediakan atau tercatat secara lengkap.

(b) *Neutrality*

Entitas tidak dapat memilah informasi untuk memihak kepada suatu entitas atau menguntungkan pihak lain.

(c) *Free From Error*

Informasi yang disajikan tidak memiliki kesalahan.

Kieso *et al.* (2018) mengatakan bahwa *enhancing qualities* adalah karakteristik yang mendukung karakteristik kualitatif, yang digunakan untuk memilah informasi yang lebih berguna daripada yang lain. *Enhancing qualities* menurut Kieso *et al.* (2018) terdiri dari:

(a) *Comparability*

Keputusan pengguna meliputi pemilihan antara beberapa alternatif yang tersedia. Maka dari itu, informasi mengenai entitas pelapor lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan informasi serupa tentang entitas lain dan dengan informasi serupa tentang entitas yang sama untuk periode dan tanggal lainnya.

(b) *Verifiability*

Keterverifikasian membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi yang disajikan merepresentasikan fenomena ekonomik secara tepat sebagaimana mestinya.

(c) *Timeliness*

Ketepatanwaktuan (*timeliness*) merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Secara garis besar, semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi maka semakin kurang berguna informasi tersebut.

(d) *Understandability*

Informasi harus memakai metode yang dimengerti atau disepakati. Kepemahaman dalam informasi dibantu oleh pengklasifikasian, pengarakteristikan, dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas.

Karakteristik laporan keuangan yang terpenuhi membantu pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan ekonomik.

2.1.5 Audit

Menurut Arens *et al.* (2018), audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh individu yang kompeten dan independen. Tipe-tipe audit dibagi menjadi 3, yaitu:

(a) *Operational Audit* (Audit Operasional)

Audit operasional mengkaji efisiensi dan efektivitas semua bagian dari metode dan prosedur operasi perusahaan. Atas jasa yang dilakukan oleh auditor ini, manajemen perusahaan mengharapkan rekomendasi untuk peningkatan operasi.

(b) *Compliance Audit* (Audit Kepatuhan)

Audit kepatuhan dilakukan untuk mengevaluasi pihak yang diaudit terkait kepatuhannya dalam menjalankan prosedur, aturan, atau regulasi khusus yang ditetapkan oleh pihak dengan otoritas yang lebih tinggi.

(c) *Financial Statement Audit* (Audit Laporan Keuangan)

Audit laporan keuangan dilakukan untuk mengukur apakah laporan keuangan telah sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.

Manajemen perusahaan perlu pihak ketiga yang independen, dimana dalam hal ini adalah auditor, untuk melakukan kegiatan audit terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan.

Standar audit mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman dari masing-masing lima komponen pengendalian internal untuk merencanakan audit. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang rancangan pengendalian yang relevan dan apakah pengendalian telah ditempatkan dalam operasi oleh entitas. Menurut Arens et al (2017) lima komponen pengendalian internal sebagaimana didefinisikan oleh kerangka kerja *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*, yaitu:

a. Lingkungan pengendalian (*control environment*)

Terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang secara keseluruhan mencakup sikap manajemen puncak, dewan direksi, dan pemilik entitas mengenai pengendalian internal dan kepentingan entitas tersebut.

b. Penilaian risiko (*risk assessment*)

Penilaian risiko adalah proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat mencegah pencapaian tujuan entitas.

c. *Aktivitas pengendalian (control activities)*

Kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk pencapaian tujuan entitas.

d. *Informasi dan komunikasi (information and communication)*

Tujuan dari informasi akuntansi dan sistem komunikasi entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas, serta menjaga akuntabilitas atas aset.

e. *Pemantauan (monitoring)*

Pemantauan berkaitan dengan penilaian berkelanjutan atau berkala dari kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian berjalan sebagaimana dimaksud dan merancang ulang apabila terdapat perubahan kondisi.

Menurut Arens *et al.* (2018), proses audit memiliki 4 (empat) tahapan, yaitu:

(a) Merencanakan dan mendesain pendekatan audit

Dalam tahapan ini terdapat tiga aspek kunci, yaitu memperoleh pemahaman mengenai entitas dan lingkungannya, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, dan menilai risiko salah saji.

Program audit adalah daftar prosedur audit untuk area audit atau keseluruhan audit. Prosedur audit merupakan instruksi terperinci yang menjelaskan bukti audit yang akan diperoleh selama audit. Terdapat delapantipe bukti audit, yaitu:

a. *Pemeriksaan fisik (physical examination)*

Inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aset berwujud (*tangible asset*). Jenis bukti ini sering berkaitan dengan persediaan dan kas, tetapi dapat pula diterapkan untuk berbagai

verifikasi atas sekuritas, wesel tagih, serta aset tetap berwujud.

b. Konfirmasi (*confirmation*)

Menggambarkan penerimaan tanggapan baik secara tertulis langsung dari pihak ketiga yang memverifikasikan keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh auditor. Permintaan ini ditujukan bagi klien, dan klien meminta pihak ketiga untuk memberikan tanggapannya secara langsung kepada auditor.

c. Inspeksi (*inspection*)

Pemeriksaan auditor atas dokumen dan catatan klien untuk memperkuat informasi yang atau harus, termasuk dalam laporan keuangan.

d. Prosedur analitis (*analytical procedures*)

Didefinisikan oleh standar audit sebagai evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan *non*-keuangan. Tujuan prosedur analitis yaitu digunakan untuk memahami industri dan bisnis klien, menilai kemampuan keberlanjutan entitas, menunjukkan adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, dan memberikan bukti yang mendukung saldo akun.

e. Wawancara dengan klien (*inquiries of the client*)

Memperoleh informasi secara tertulis maupun lisan dari klien dalam menanggapi pertanyaan dari auditor.

f. Penghitungan ulang (*recalculation*)

Melibatkan pengecekan kembali sampel perhitungan yang dilakukan oleh klien.

g. Pelaksanaan ulang (*reperformance*)

Pengujian independen auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang pada awalnya dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal entitas.

h. Observasi (*observation*)

Melihat suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh pihak lain.

- (b) Melaksanakan pengujian pengendalian (*tests of control*) dan pengujian substantif atas transaksi (*substantive tests of transaction*). Sebelum auditor memutuskan untuk mengurangi penilaian auditor atas risiko pengendalian yang direncanakan apabila pengendalian internal dianggap efektif, auditor harus menguji keefektifan pengendalian tersebut. Prosedur pengujian tersebut disebut dengan pengujian pengendalian (*tests of control*). Auditor juga harus mengevaluasi pencatatan transaksi klien dengan memverifikasi jumlah moneter transaksi tersebut, proses tersebut disebut dengan pengujian substantif atas transaksi (*substantive tests of transaction*).
- (c) Melaksanakan prosedur analitis substantif (*substantive analytical procedures*) dan pengujian rincian saldo (*tests of detail of balances*). Terdapat dua kategori umum dalam prosedur ini. Prosedur analitis terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non keuangan. Ketika prosedur analitis digunakan sebagai bukti untuk memberikan jaminan tentang saldo akun maka disebut prosedur analitis substantif (*substantive analytical procedures*). Pengujian rincian saldo (*tests of detail of balances*) merupakan prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah satu saldo pada saldo-saldo dalam laporan keuangan. Pengujian atas rincian saldo akhir merupakan hal yang penting karena sebagian besar bukti diperoleh dari pihak ketiga dan dianggap berkualitas tinggi.
- (d) Melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit. Setelah auditor menyelesaikan semua prosedur untuk setiap tujuan audit dan akun laporan keuangan serta pengungkapan yang terkait, maka diperlukan waktu untuk menggabungkan semua informasi yang diperoleh untuk membuat kesimpulan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar. Laporan audit merupakan tahap terakhir dalam seluruh proses audit. Opini audit adalah pernyataan standar dari kesimpulan auditor yang didapatkan berdasarkan kesimpulan dari proses audit.

2.1.6 Audit Delay

Audit delay adalah jangka waktu dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Menurut Devina (2020), *audit delay* adalah kondisi dimana terdapat perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan menunjukkan tentang lamanya waktu penyelesaian audit.

Penundaan dalam penyampaian laporan keuangan atau *reporting delay* terbagi menjadi tiga kriteria, antara lain (Hidayatullah et al., 2020):

- (a) *Preliminary Lag* merupakan interval jumlah hari antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahuluan oleh bursa.
- (b) *Auditor's Signature Lag* adalah interval jumlah hari antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal laporan auditor ditandatangani.
- (c) *Total Lag* merupakan interval jumlah hari antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal penerimaan laporan keuangan tahunan dipublikasikan di bursa.

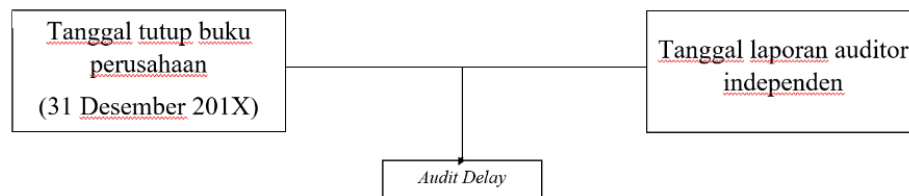
Perusahaan yang telah *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan keuangan auditan kepada publik. Hal ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan diperkuat dengan Peraturan No.X.K.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-36/PM/2003 mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan mengenai keterlambatan publikasi laporan keuangan terkait dengan pentingnya waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diatur melalui keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 peraturan nomor 1-H. Perusahaan wajib melaporkan laporan keuangan auditan dan mengumumkannya kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan

keuangan tahunan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. 0 sampai 30 hari : Peringatan tertulis I.
2. 31 sampai 60 hari : Peringatan tertulis II dan denda Rp50.000.000,-
3. 61 sampai 90 hari : Peringatan tertulis III dan denda Rp150.000.000,-
4. Lebih dari 91 hari : Suspensi.

Berdasarkan definisi diatas, *audit delay* dapat disimpulkan memiliki konsep berikut:



Gambar 2. 2 Konsep Audit Delay

Sumber: Devina (2020)

Keterangan:

Audit delay: Rentang waktu penyelesaian audit yang dapat dihitung dari tanggal tutup buku perusahaan hingga tanggal laporan auditor independen.

Tanggal tutup buku: Tanggal dimana manajemen perusahaan telah menyelesaikan laporan keuangan tahunan yaitu 31 Desember 201X.

Tanggal laporan auditor independen: Tanggal yang tercantum pada laporan auditor ketika auditor telah menyelesaikan proses audit atas laporan keuangan tahunan perusahaan.

Audit delay diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari dan dapat dirumuskan sebagai berikut (Devina, 2020):

$$\begin{aligned} \textit{Audit delay} &= \text{tanggal terbit laporan keuangan auditan} \\ &\quad - \text{tanggal tutup buku perusahaan} \end{aligned}$$

[2. 1]

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari besarnya total aset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2018) dalam PSAK 1 aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan dapat mengalir ke entitas. Penelitian ini memproksikan ukuran perusahaan dengan natural log (Ln) *Total Asset*. Penggunaan metode pengukuran dengan natural log (Ln) memiliki maksud untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan. Total aset yang dimiliki sebuah perusahaan dapat bernilai sangat besar bahkan hingga triliun. Penggunaan natural log (Ln) menyederhanakan nilai total aset yang berupa miliar bahkan triliun tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya. Rumus ukuran perusahaan (Devina, 2020):

$$SIZE = Ln (Total Asset)$$

[2. 2]

Keterangan:

$Ln (Total Asset)$ = logaritma natural total aset

Total Assets = jumlah total aset yang dimiliki perusahaan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 53/POJK 04/2017 ukuran perusahaan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Emiten skala kecil

Badan hukum yang memiliki total aset tidak lebih dari Rp50.000.000.000,-(lima puluh miliar Rupiah).

2. Emiten skala menengah

Badan hukum yang memiliki total aset lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

3. Emiten skala besar

Badan hukum yang memiliki total aset lebih dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IAI, 2018), Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas. Aset diakui dalam laporan posisi keuangan jika kemungkinan besar bawa manfaat ekonomik masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal (IAI, 2018).

Menurut Weygandt (2019), Total aset terdiri dari *current assets*, *long term investment*, *property, plant, and equipment*, dan *intangible assets*. *Current assets* adalah aset yang perusahaan harapkan dapat dikonversi menjadi uang tunai atau digunakan dalam waktu satu tahun, seperti *prepaid expenses*, *inventories*, *receivables*, *short-term investment*, dan *cash*. Menurut Kieso *et al* (2018), *Current assets* merupakan kas dan aset lain perusahaan yang diharapkan dapat dikonversi menjadi uang tunai, dijual, atau digunakan dalam satu tahun atau dalam siklus operasi perusahaan, seperti *cash*, *short-term investment*, *prepaid expenses*, *receivables*, dan *inventories*.

1. *Cash* merupakan aset yang paling likuid, berupa koin, cek serta rekening bank milik perusahaan.
2. *Short-term investment*, perusahaan harus melaporkan sekuritas perdagangan (utang atau ekuitas) sebagai aset lancar, dan semua perdagangan efek dilaporkan pada nilai wajar.

3. *Prepaid expenses* adalah biaya yang sudah dibayar tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi.
4. *Receivables* adalah klaim yang dimiliki perusahaan terhadap pelanggan untuk barang atau jasa yang telah diberikan perusahaan.
5. *Inventory* adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual.

Menurut Kieso *et al* (2018), Aset tidak lancar (*non-current assets*) merupakan aset yang tidak memenuhi definisi dari aset lancar (*current assets*), seperti *others assets, intangible assets, property, plant dan equipment, dan long-term investments*.

1. *Other assets* memiliki banyak macam seperti biaya dibayar dimuka jangka panjang (*long-term prepaid expense*) dan piutang tidak lancar (*non-current receivables*). Item lain yang termasuk seperti aset dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual, dan kas atau surat berharga yang terbatas (*restricted cash or securities*).
2. *Intangible assets* adalah aset yang tidak memiliki wujud fisik dan bukan instrumen keuangan, termasuk paten, hak cipta, *franchises, goodwill, trademarks, trade names, dan customer list*.
3. *Property, plant dan equipment* adalah aset berwujud yang memiliki jangkawaktu panjang yang digunakan dalam operasi bisnis, termasuk *physical property* seperti tanah, bangunan, mesin, *furniture*, alat, dan *wasting resources*.
4. *Long-term investments* sering disebut investasi yang normalnya memiliki satu kondisi dari empat tipe sebagai berikut:
 - a. Investasi pada saham seperti obligasi, saham biasa atau wesel jangka panjang.
 - b. Investasi pada aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi, seperti tanah untuk spekulasi.
 - c. Investasi yang disisihkan untuk dana khusus, seperti dana cadangan, dana pensiun, atau dana ekspansi pabrik.

- d. Investasi pada anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi atau perusahaan asosiasi.

2.1.8 Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur keberhasilan operasi dari sebuah perusahaan untuk periode tertentu. Profitabilitas menunjukkan bagaimana perusahaan menghasilkan profit dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh perusahaan (Rani & Triani, 2021). Menurut Kieso et al. (2019), rasio profitabilitas terdiri dari:

1. *Profit Margin*

Mengukur persentase laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap Rupiah yang dihasilkan dalam penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Rasio *profit margin* diukur menggunakan pembagian laba bersih terhadap penjualan bersih perusahaan.

2. *Asset Turnover*

Mengukur tingkat efisiensi suatu perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio *asset turnover* diukur menggunakan pembagian penjualan bersih terhadap rata-rata aset.

3. *Return on Asset*

Mengukur profitabilitas secara keseluruhan dengan menggunakan pembagian laba bersih terhadap rata-rata aset.

4. *Return on Ordinary Shareholder's Equity*

Mengukur seberapa banyak Rupiah yang dihasilkan dalam laba bersih perusahaan untuk setiap Rupiah yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Rasio ini dihitung menggunakan pembagian laba bersih terhadap rata-rata modal pemegang saham biasa.

5. *Earning per Share*

Mengukur laba bersih yang dihasilkan dari setiap lembar saham biasa perusahaan. Rasio dihitung menggunakan pembagian laba bersih terhadap rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar.

6. *Price Earning Ratio*

Mengukur rasio dari harga pasar masing-masing saham untuk laba per saham yang berguna untuk investor dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang. Rasio dihitung dengan menggunakan pembagian harga pasar per lembar saham terhadap laba per saham.

7. *Payout Ratio*

Mengukur persentase pendapatan yang tersebar dalam bentuk dividen tunai. Rasio dihitung menggunakan pembagian dividen tunai terhadap laba bersih.

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan proksi *Return on Asset* (Devina, 2020).

$$PL (ROA) = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$$

[2. 3]

Menurut Kieso et al (2018), net income merupakan hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. Net income merupakan laba setelah semua pendapatan dan beban untuk suatu periode yang dipertimbangkan. Hal ini dipandang penting oleh banyak orang sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan PSAK No. 1 (IAI, 2018), laba tahun berjalan (*net income*) disajikan dalam laporan labarugi. Laba tahun berjalan diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan sehingga menghasilkan laba bruto. Laba bruto ditambah dengan penghasilan lain serta dikurangi dengan biaya distribusi, beban administrasi, beban lain-lain, biaya pendanaan, dan bagian laba entitas asosiasi sehingga menghasilkan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan sehingga menghasilkan laba tahun berjalan.

2.1.9 Opini Audit

Menurut R et al., 2019, pada akhir proses pemeriksaan umum (*general audit*), KAP akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri dari:

1. Lembaran opini, yang merupakan tanggung jawab akuntan publik, di mana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen.
2. Laporan keuangan, yang terdiri dari:
 - a. Laporan Posisi Keuangan;
 - b. Laporan Laba-Rugi komprehensif;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - d. Laporan Arus Kas;
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan, yang antara lain berisi bagian umum (menjelaskan latar belakang perusahaan), kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos neraca dan laba rugi;
 - f. Informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting seperti perincian piutang, aset tetap, utang, beban umum dan administrasi, serta beban penjualan.

Menurut Arens *et al.* (2017) terdapat delapan bagian standar laporan audit yang terdiri dari:

1. Judul laporan (*report title*)

Standar audit menyatakan laporan harus diberikan judul yang mengandung kata *independent*. Kewajiban pencantuman kata ini untuk memberitahu para pemakai laporan bahwa audit yang dilakukan tidak menyimpang.

2. Alamat laporan audit (*audit report address*)

Laporan biasanya ditujukan untuk perusahaan, pemegang saham, atau dewan direksi perusahaan.

3. Paragraf pendahuluan (*introductory paragraph*)

Paragraf pertama yang menunjukkan kantor akuntan publik telah melakukan audit.

4. Tanggung jawab manajemen (*management responsibility*)

Paragraf menyatakan bahwa laporan ini merupakan tanggung

jawab manajemen. Tanggung jawab ini meliputi prinsip-prinsip akuntansi yang tepat dan penyelenggaraan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

5. Tanggung jawab auditor (*auditor responsibility*)

Paragraf pertama menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku umum. Paragraf kedua menunjukkan bahwa prosedur yang digunakan tergantung pada pertimbangan auditor dan mencakup penilaian risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Paragraf ketiga menunjukkan auditor yakin bahwa bukti audit yang tepat dan mencukupi telah diperoleh demi mendukung pendapat auditor.

6. Paragraf opini (*opinion paragraph*), paragraf terakhir dalam laporan audit menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit.

7. Nama dan alamat kantor akuntan publik (*name and address of CPA firm*), nama mengidentifikasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melaksanakan audit. Kota dan negara bagian lokasi KAP juga harus dicantumkan.

8. Tanggal laporan audit (*audit report date*), tanggal yang tepat untuk dicantumkan pada laporan audit adalah ketika auditor menyelesaikan prosedur audit di lokasi pemeriksaan. Tanggal ini penting karena menunjukkan hari terakhir dari tanggung jawab auditor untuk mereview peristiwa yang penting setelah tanggal laporan keuangan.

Tanggal laporan akuntan harus sama dengan laporan selesainya pekerjaan lapangan, karena menunjukkan sampai tanggal berapa akuntan bertanggung jawab untuk menjelaskan hal-hal penting yang terjadi. Jika sesudah tanggal selesainya pekerjaan lapangan (*audit field work*), terjadi peristiwa penting yang jumlahnya material dan mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan yang diperiksa, dan saat itu laporan audit belum dikeluarkan, auditor harus menjelaskan kejadian penting tersebut dalam catatan atas laporan keuangan dan lembaran opini.

Menurut R et al., 2019, opini audit merupakan opini yang diberikan auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik, ada lima jenis pendapat auditor yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian

Dikatakan pendapat wajar tanpa pengecualian jika laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas telah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan seorang auditor menambahkan penjelasan (bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Keadaannya meliputi:

- a. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain;
- b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan secara menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
- c. Jika terdapat kondisi dan peristiwa semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai;
- d. Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam

metode penerapannya; Data keuangan kuartalan tertentu diharuskan oleh BAPEPAM-LK namun tidak disajikan atau tidak di-review;

- e. Informasi tambahan yang diharuskan oleh IAI telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh dewan tersebut;
- f. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian

Pendapat ini dinyatakan bila:

- a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat;
- b. Auditor yakin, atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang berdampak material dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat yang tidak wajar;
- c. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Ia juga harus mencantumkan

bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf pendapat.

Pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi kata kecuali atau pengecualian dalam suatu frasa seperti kecuali untuk atau dengan pengecualian untuk frasa tergantung atas atau dengan penjelasan berikut ini memiliki makna yang tidak jelas atau tidak cukup kata oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari. Karena catatan atas laporan keuangan merupakan bagian laporan keuangan auditan, kata seperti yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, jika disaiikan secara wajar dalam semua hal yang material, jika dibaca sehubungan dengan catatan 1 mempunyai kemungkinan untuk disalah tafsirkan dan oleh karena itu pemakaiannya dihindari.

4. Pendapat tidak wajar

Pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat.

a. Auditor tidak menyatakan pendapat bila tidak dapat merumuskan suatu pendapat bilamana tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut;

b. Auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan.

2.1.10 Umur Perusahaan

Umur perusahaan menunjukkan bahwa suatu perusahaan tetap ada, berdiri, dan beroperasi, serta mampu berkompetisi dengan perusahaan lainnya untuk

menjalankan kegiatan operasional. Umur perusahaan menggambarkan seberapa lama perusahaan berjalan yang bisa dilihat dari tahun berdirinya perusahaan sampai tahun penelitian (Endiana & Apriada, 2020). Umur perusahaan dapat dihitung sejak perusahaan berdiri maupun sejak perusahaan masuk (listing) di Bursa Efek Indonesia (Marina et al., 2021).

Menurut Marina et al., 2021), rumus Umur Perusahaan adalah:

$$AOC = \text{Tahun Penelitian} - \text{Tahun Berdiri Perusahaan}$$

[2. 4]

Keterangan:

Tahun Penelitian : Tahun telah menerbitkan Laporan Keuangan perusahaan

Tahun Berdiri Perusahaan : Tahun pertama kali perusahaan berdiri

2.2 Kerangka Pemikiran

2.1.11 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Delay*

Menurut Jura & Tewu (2021), ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap audit delay yang artinya semakin besar ukuran perusahaan maka audit delay akan semakin sedikit. Sebaliknya semakin kecil ukuran perusahaan maka audit delay akan semakin lama. Hal ini dapat disebabkan karena perusahaan yang berskala besar memiliki kecenderungan melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang berskala kecil. Dikarenakan perusahaan-perusahaan besar diawasi secara ketat oleh investor, pengawas permodalan hingga pemerintah sehingga manajemen sering mengalami tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk melaporkan laporan audit lebih cepat. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, hipotesis alternatif terkait ukuran perusahaan dan *audit delay* adalah sebagai berikut:

Ha₁: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.1.12 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Audit Delay*

Dalam penelitian Asep Effendi et al., (2019), semakin tinggi tingkat profitabilitas maka keinginan perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan juga akan semakin cepat, dikarenakan akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan kepada investor. Profitabilitas perusahaan dilihat dari laporan laba rugi perusahaan (*income statement*) yang menunjukkan laporan hasil kinerja selama periode tertentu. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, hipotesis alternatif terkait profitabilitas dan *audit delay* adalah sebagai berikut:

Ha₂: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.1.13 Pengaruh Opini Audit Terhadap *Audit Delay*

Menurut Juanta & Ratih (2021), opini selain wajar tanpa pengecualian merupakan opini yang tidak diharapkan oleh semua manajemen. Semakin tidak baik opini yang diterima oleh perusahaan maka semakin lama laporan keuangan audit dipublikasikan. Laporan keuangan yang disampaikan tidak tepat waktu mencerminkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang ada. Pada perusahaan yang menerima pendapat selain wajar tanpa pengecualian akan menunjukkan *audit delay* yang lebih panjang dibandingkan dengan perusahaan yang menerima pendapat wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, hipotesis alternatif terkait opini audit dan *audit delay* adalah sebagai berikut:

Ha₃: Opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.1.14 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap *Audit Delay*

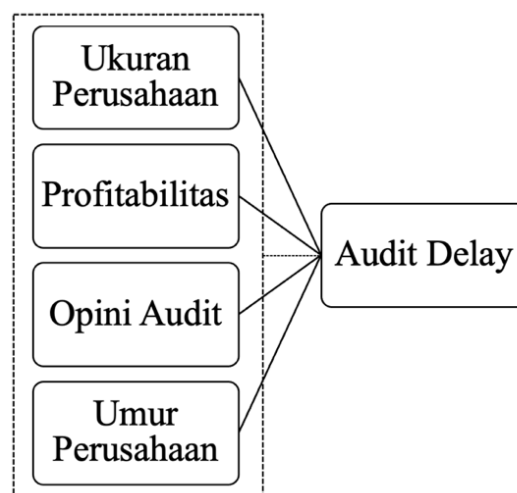
Menurut Marina et al., (2021) mengungkapkan bahwa perusahaan yang telah berumur memiliki banyak pengalaman dalam berbagai bidang masalah yang terkait dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam perusahaan dan bagaimana cara untuk mengatasinya, sehingga perusahaan cenderung memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi. Perusahaan yang lebih berumur sangat berkomitmen untuk menerbitkan laporan keuangan yang tepat waktu dan juga dalam pengungkapan hal-hal dalam laporan keuangan karena perusahaan yang sudah tua sangat memperhatikan citra mereka di pasar. Menurut

Marina et al. (2021), umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, hipotesis alternatif terkait umur perusahaan dan *audit delay* adalah sebagai berikut:

Ha₄: Umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.3 Metode Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan dengan gambar 2.3 sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Model Penelitian

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA